

BUDAYA POLITIK PARTAI DI TINGKAT LOKAL: PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DI PURBALINGGA

Indaru Setyo Nurprojo, S.IP, MA¹ dan Bowo Sugiarto, S.IP, M.Si²

ABSTRACT

This article is to describe the political culture of the Prosperous Justice Party (PKS) in Purbalingga. Political culture in this article are understood as the number of values, knowledge and fundamental beliefs that give shape and substance to the political processes. This article will also discuss the political socialization experienced by PKS cadres to gain a good understanding of the political culture of PKS. The approach used in this article are therefore more focused to institutional analysis approach of the processes that institutionalized. Values and beliefs that form the basis of political culture from the PKS their understanding of Islam. Islam as a religion is believed its teachings to include all areas of life, including politics. Political activity is believed to be part of the missionary activity. Political socialization experienced by the PKS cadres, mainly obtained through halaqah.

Keywords: Partai Keadilan Sejahtera, political culture, political socialization, missionary, halaqah.

ABSTRAK

Artikel ini adalah untuk menjelaskan budaya politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Purbalingga. Budaya politik dalam hal ini adalah dipahami sebagai jumlah nilai-nilai, pengetahuan dan keyakinan mendasar yang memberikan bentuk dan substansi dengan proses politik. Artikel ini juga akan membahas sosialisasi politik yang dialami oleh kader PKS untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang budaya politik PKS. Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini sehingga lebih dititikberatkan pendekatan analisis kelembagaan proses-proses yang dilembagakan. Nilai-nilai dan keyakinan yang membentuk dasar budaya politik dari PKS pemahaman mereka terhadap Islam. Islam sebagai agama diyakini ajaran-ajaran dan mencakup semua bidang kehidupan, termasuk politik. Kegiatan politik diyakini menjadi bagian dari kegiatan misionaris. Sosialisasi politik yang dialami kader PKS, terutama yang diperoleh melalui halaqah.

Keywords: Prosperous Justice Party, the political culture, political socialization, the missionary, halaqah.

¹ Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed

² Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP Unsoed

Pendahuluan

Artikel ini hendak mendeskripsikan budaya politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Deskripsi tentang budaya politik bertujuan untuk menjelaskan tentang keyakinan dan nilai-nilai yang membentuk perilaku dan tindakan politik sebuah populasi. Meskipun artikel ini menggunakan penyebutan budaya politik partai, namun yang sebenarnya dituju adalah budaya politik para kader atau anggotanya. Ketika kita menyebut partai politik yang terbayang memang sebuah institusi politik, namun sejatinya partai politik tidak lain dari sebuah kumpulan orang yang terorganisasi dengan seperangkat ideologi tertentu bertujuan untuk meraih kekuasaan. Oleh karenanya, ketika membicarakan budaya politik partai tidak mungkin jika tidak menjangkau kumpulan orang yang membentuknya.

Diskusi tentang budaya politik dalam konteks politik Indonesia kekinian tetap sangat relevan mengingat budaya politik masyarakat berpengaruh terhadap kestabilan demokrasi sebuah bangsa (Almond dan Verba, 1963). Artikel ini tidak secara khusus membahas budaya politik masyarakat namun konsep budaya politik tidak selalu harus digunakan untuk menjelaskan sebuah bangsa atau masyarakat. Jika budaya politik dipahami dapat digunakan untuk menjelaskan sebuah populasi, tentu dia relevan untuk digunakan mendekati sebuah komunitas terorganisasi seperti partai politik. Meski demikian, tentu saja ada keterbatasannya karena sebelum menjadi kader sebuah partai, seseorang sebelumnya sudah mengalami sosialisasi politik dari keluarganya, sekolah atau lingkungan sekitarnya.

Dengan keterbatasan seperti ini, artikel ini hanya mungkin menjangkau budaya politik dan sosialisasi politiknya secara institusional. Yang itu berarti, artikel ini tidak hendak menjelaskan budaya politik di luar proses yang institusional di kalangan PKS. Artikel ini hanya akan memotret nilai-nilai dan keyakinan yang dibagi dan diwariskan di kalangan kader PKS. Dalam kondisi demikian, artikel ini akan menggunakan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada institusi daripada individu – meskipun itu tidak berarti tidak akan mengamati level individu. Contoh-contoh yang dikemukakan dalam artikel ini pun akan dibatasi dalam konteks lokal tertentu, yaitu PKS di Kabupaten Purbalingga.

Pembahasan selanjutnya akan diawali dengan elaborasi singkat tentang konsep budaya politik. Elaborasi tersebut bertujuan untuk memperjelas pengertian budaya politik yang digunakan dalam artikel ini. Sebelum lebih jauh

membahas konsep-konsep kunci dalam budaya politik PKS, artikel ini akan meninjau sejarah berdirinya PKS. Akan dijelaskan bahwa sebagai sebuah gerakan Islam, komunitas yang sekarang dikenal sebagai PKS telah lebih dahulu membentuk sebuah komunitas keagamaan yang eksklusif. Komunitas itu kemudian dikenal dengan sebutan gerakan Tarbiyah.³ Setelah itu, pembahasan akan berlanjut mengelaborasi konsep-konsep kunci budaya politik PKS, yaitu Islam dalam pemahaman PKS, politik dakwah dan *halaqah*.

Budaya Politik

Budaya politik mulai diperkenalkan dalam khasanah ilmu-ilmu sosial kontemporer pada pertengahan abad 20. Ilmuwan sosial seperti Margaret Mead dan Ruth Benedict, Theodor Adorno dan koleganya serta Harold Laswell dianggap telah memulai pendekatan yang menekankan budaya dan kepribadian dalam menjelaskan perbedaan dari macam-macam program, institusi atau otoritas politik (Olick dan Omeltchenko dalam *International Encyclopedia of Social Sciences*). Salah satu karya yang paling berpengaruh dalam kajian budaya politik adalah karya Gabriel Almond dan Sidney Verba, *The Civic Culture* (1963). Dalam karya dua ilmuwan yang terakhir, budaya politik dipahami sebagai sebuah mata rantai yang menghubungkan makro-politik (sistem politik) dengan mikro-politik (masyarakat) (Kamrava, 1996).

Dalam pandangan Lucian Pye, budaya politik adalah sejumlah nilai-nilai, perasaan dan pengetahuan yang sifatnya fundamental yang memberi bentuk dan substansi bagi proses-proses politik (dalam Hague, Harrop dan Breslin, 1998: 59). Sedangkan menurut Newton dan Van Deth, budaya politik adalah pola-pola perilaku, nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan orang tentang politik, baik itu yang disadari maupun yang tidak disadari dan yang eksplisit ataupun implisit (2005: 135). Senada dengan pendapat di atas, Mehran Kamrava mendefinisikannya sebagai perilaku politik kolektif dari sebuah populasi, juga pandangan dan orientasi mereka tentang politik secara umum maupun tentang simbol dan aktivitas politik tertentu (1996: 58).

Meskipun konsep ini dikritik karena begitu kompleks dan tidak mudah dimengerti, namun tidak bisa juga dipungkiri bahwa dia bermanfaat untuk

³ Selain dikenal sebagai gerakan Tarbiyah, PKS juga lekat dengan sebutan Jamaah Tarbiyah.

memahami perilaku politik karena dia dapat kita ibaratkan sebagai peta tentang bagaimana orang berpikir dan bertindak. Sebagaimana layaknya peta, dia tidak menggambarkan kenyataan secara detil namun mampu memandu kita dalam memahami apa yang nyata. Meskipun juga bisa tampak menyederhanakan apa yang ada, dia dapat membantu kita untuk fokus menemukan pola-pola dari perilaku, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai politik dari sebuah populasi (Newton dan Van Deth, 2005: 137).

Berdasarkan paparan pengertian dan batasan dari konsep budaya politik di atas, artikel ini menggunakan konsep tersebut guna memahami dan menjelaskan apa yang sebenarnya melatarbelakangi perilaku dan tindakan politik dari para anggota PKS, yaitu keyakinan, nilai-nilai dan sentimen tentang politik. Ada dua pendekatan dalam budaya politik, yaitu pendekatan individualistik dan institusional. Pendekatan individualistik hendak mencari tahu nilai-nilai dan perilaku individual yang dilakukan lewat survey. Sedangkan pendekatan yang kedua lebih berfokus pada analisis dokumen untuk mencari tahu perilaku kolektif dari suatu institusi politik (Zussman dalam *The Canadian Encyclopedia*). Artikel ini mengutamakan pendekatan yang kedua namun untuk melengkapi dan memperkuat argumen, dilakukan juga wawancara terhadap pengurus atau anggota PKS. Wawancara itu dilakukan untuk mendapatkan contoh-contoh perilaku politik kader PKS di Purbalingga.

Untuk memahami lebih lengkap budaya politik anggota PKS, tulisan ini juga akan menjangkau pembahasan mengenai sosialisasi politik yang dialami oleh mereka. Sosialisasi politik adalah lewat mana individu belajar mengenai nilai-nilai dan perilaku politik (Hague, Harrop dan Breslin, 1998: 64). Lewat sosialisasi politik individu akan memahami, menerima dan mendukung atau menolak sistem politik atau pemerintahan yang ada. Urgensi membahas sosialisasi politik dalam tulisan ini adalah karena PKS selama ini dikenal sebagai partai kader. Oleh karena itu, pembahasan nanti akan melihat bagaimana nilai-nilai dan keyakinan politik anggota PKS disosialisasikan. Karena sosialisasi politik dapat terjadi secara langsung atau tidak, maka analisis akan menjangkau baik aktivitas kaderisasi yang dimaksudkan sebagai sosialisasi politik maupun yang tidak sengaja dimaksudkan.

Dari gerakan ke partai

Meskipun baru secara formal terbentuk pada 1998, namun sesungguhnya embrio Partai Keadilan (PK) telah bergerak di bawah tanah sejak tahun 1980-an. Waktu itu, gerakan Tarbiyah sudah menjalankan aktivitas dakwah untuk merekrut kader-kader muda di kampus-kampus seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Universitas Airlangga (Unair). Mereka masih bergerak di bawah tanah karena konteks politik waktu itu yang tidak memungkinkan mereka untuk tampil di permukaan. Pada awal 1980-an, rezim Orde Baru sedang gencar-gencarnya menekan kelompok-kelompok Islam dan politik mahasiswa. Dalam suasana sosial politik yang penuh pembatasan seperti itulah mahasiswa-mahasiswa muslim mengorganisasikan diri ke dalam model kelompok-kelompok kecil atau sel-sel, yang dikenal dengan nama *usrah* (Fealy dan Bubalo, 2007:108).

Pada masa-masa bergerak di bawah tanah itu, gerakan Tarbiyah tidak terlibat dalam politik praktis. Mereka hanya bergerak di kampus-kampus untuk merekrut kader-kader baru. Bahkan ada indikasi, pada masa-masa awalnya, gerakan Tarbiyah sebenarnya tidak mempunyai agenda membentuk partai politik dalam jangka waktu yang ditentukan. Meskipun memang sedari awal gerakan Tarbiyah sudah memiliki orientasi politik yang jelas dan sistematis. Mereka meyakini Islam memiliki ajaran tentang politik dan dalam kondisi waktu itu Islam adalah alternatif bagi praktik politik yang ada. Meski memiliki pandangan politik yang jelas, namun masih belum tentu berwujud sebuah partai politik (Machmudi, 2007: 177).

Setelah lama hanya melakukan kaderisasi, peluang untuk muncul ke permukaan itu datang ketika Soeharto lengser dari kursi kepresidenan. Sempat terjadi diskursus dalam menentukan bentuk formalisasi gerakan Tarbiyah pasca-Soeharto itu. Survey pun dilakukan untuk memutuskan apakah gerakan Tarbiyah akan berubah menjadi partai atau menjadi organisasi massa (ormas). Mayoritas kader yang dimintai pendapatnya menyatakan setuju untuk membentuk sebuah partai politik dan sedikit yang menghendaki menjadi ormas atau tetap memilih berbentuk gerakan informal (Machmudi, 2007:177). Maka, pada 20 Juli 1998 dideklarasikanlah sebuah partai politik sebagai wadah baru bagi kader gerakan Tarbiyah. Partai itu diberi nama Partai Keadilan (PK). Pada pemilu 1999, PK

mendapat 1,4 persen suara sehingga hanya berhasil menempatkan tujuh kadernya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Fase berikutnya dari gerakan Tarbiyah adalah ketika menghipi kenyataan jumlah suara sebesar 1,4 persen itu tidak mencukupi *electoral threshold* yang sebesar 2 persen. Maka tiket untuk mengikuti pemilu 2004 baru didapatkan setelah PK merubah namanya menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Perubahan itu membawa pengaruh pada langkah politik PKS. Pada pemilu 2004 itu PKS mulai mengurangi jargon-jargon keislaman dalam kampanye mereka. Bahkan *tagline* mereka dalam pemilu, "Bersih dan Peduli", tampak terlihat netral secara ideologis. Entah berkaitan atau tidak dengan penurunan dosis jargon-jargon keislaman, faktanya suara PKS dalam pemilu itu melonjak drastis menjadi 7,3 persen yang itu berarti sama dengan 45 kursi di DPR.

Pemilu berikutnya pada 2009 adalah batu ujian penting bagi eksistensi PKS. Setelah pada pemilu sebelumnya PKS menurunkan dosis jargon-jargon keislamannya, kini penurunan dosis itu dilakukan lebih jauh lagi. Ketika mengadakan Musyawah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali pada 2008, sebagian elit PKS meluncurkan wacana PKS sebagai partai terbuka. Meskipun tidak sampai menjadi sebuah keputusan resmi Mukernas, namun media dan publik sudah terlanjur menyambut wacana itu. Akan tetapi, nampaknya kali ini strategi mengurangi jargon-jargon keislaman tidak membawa hasil yang memuaskan. Pada pemilu 2009 PKS hanya meraih 7,8 persen suara sehingga hanya mampu menempatkan 57 wakilnya di parlemen. Meskipun sekilas terjadi kenaikan, namun sebenarnya yang terjadi adalah penurunan jumlah suara yaitu dari 8.325.020 (pemilu 2004) suara ke 8.206.955 (pemilu 2009).

Sulit memastikan kapan gerakan Tarbiyah mulai hadir di Kab. Purbalingga. Yang pasti, pada pemilu 1999 PKS (waktu itu masih bernama PK) sudah mengikuti pemilu dan berhasil menempatkan satu orang wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu berikutnya pada 2004, PKS Purbalingga kembali hanya mampu menempatkan satu wakilnya di DPRD. Lonjakan suara baru terjadi pada pemilu 2009. PKS berhasil menambah tiga wakilnya di DPRD sehingga total wakil PKS menjadi empat. Pencapaian suara PKS di Purbalingga dianggap fenomenal mengingat selama ini kabupaten ini tergolong sebagai basis pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Islam yang *syamil*

Setiap orang yang mengikuti proses kaderisasi PKS pertama-tama akan selalu diajarkan sebuah materi tentang mengenal agama Islam, *ma'rifah din Al Islam* (Edward, 2006). Karena ia termasuk dalam materi-materi awal, maka bisa kita simpulkan bahwa materi itu termasuk ke dalam hal-hal dasar yang wajib diketahui dan dipahami oleh setiap kader PKS. Ini terbukti dengan dikategorikannya materi itu ke dalam soal akidah. Akidah dalam agama Islam merupakan doktrin yang menjadi identitas keislaman seseorang dan yang membedakannya dengan pemeluk agama lain. Selain itu, akidah juga dinilai sebagai dasar atau asas dari sebuah bangunan bernama agama Islam. Pemahaman yang keliru tentang akidah akan dianggap mengurangi keislaman seseorang atau malah membatalkan keimanan seseorang.

Islam, sebagaimana yang diajarkan kepada setiap kader PKS, diyakini sebagai ajaran yang sempurna (*syamil*). Maksudnya, Islam dianggap sebagai sistem hidup yang lengkap dan sempurna. Islam tidak hanya memuat ajaran seputar peribadatan kepada Tuhan atau aspek spiritual saja, namun menyediakan juga panduan hidup di segala bidang kehidupan, seperti pendidikan, sosial, politik, militer dan hukum/perundang-undangan. Singkatnya, Islam dalam kacamata kader PKS adalah solusi bagi kehidupan. Setiap kader PKS yang diajarkan materi tersebut, diharapkan untuk meyakini konsep Islam seperti itu dan bergerak untuk merealisasikannya dalam kehidupan mereka.

Konsekuensi logis dari ajaran itu adalah Islam tidak bisa dipisahkan dari politik. Memisahkan Islam dari politik dianggap sama saja dengan mengurangi kesempurnaan Islam. Karena dituntut untuk merealisasikan kesempurnaan Islam, termasuk juga bidang politik, maka berpolitik berdasarkan ajaran-ajaran Islam menjadi sebuah keharusan juga. Dalam materi-materi lanjut, kader PKS akan mendapat materi-materi praktis yang di antaranya adalah berbicara soal dasar-dasar politik Islam, sejarah perjuangan politik umat Islam di Indonesia dan identitas politik PKS (Edward, 2006). Dengan demikian dapat kita lihat bahwa eksistensi politik PKS mendapatkan alasannya dari doktrin tentang Islam yang sempurna.

Partisipasi politik kader PKS pun harus kita lihat dalam konteks perealisasi konsep Islam yang sempurna dan bertujuan untuk mewujudkan ideal-ideal politik menurut Islam. Sebagaimana umumnya sebuah gerakan

keagamaan, gerakan Tarbiyah pun mempunyai cita-cita untuk merubah masyarakat dan negara agar lebih sesuai dengan ideal-ideal keagamaan. Dalam konteks kaderisasi PKS, konsep perubahan masyarakat seperti itu dikenal dengan sebutan *al inqilab al islami* yaitu perubahan di segala bidang sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Selain lewat konsep perubahan yang islami, partisipasi politik PKS juga harus dimengerti dalam kerangka konsep *takwiin al ummah* yaitu pembentukan umat sebagai metode untuk mencapai kemenangan Islam. Dalam rangka membentuk umat itulah dilakukan aktivitas menyeru kebajikan dan mencegah kemungkaran (Irsyadurrahim et all (ed), tt). Partisipasi politik kader PKS menjadi bernilai religius karena dia adalah bagian dari cara pembentukan umat itu.

Politik dakwah

Secara formal maupun dalam jargon-jargon yang sering disampaikan oleh para elitnya, PKS adalah partai dakwah. Identitas sebagai partai dakwah itu berfungsi sebagai pemberi nilai tertentu pada setiap tindakan dan pilihan politik partai maupun aktivitas anggotanya. Nilai yang diberikan oleh identitas tersebut adalah terutama kualitasnya yang berkaitan dengan sesuatu yang sakral karena dakwah merupakan istilah yang lekat dengan agama (Islam). Jika dikatakan bahwa diskusi tentang budaya politik tidak akan lengkap bila mempertimbangkan faktor agama (Hague, Harrop dan Breslin, 1998), maka hal itu tampak jelas dalam kasus PKS. Bila politik dianggap sebagai bentuk dari dakwah maka aktivitas politik pun menjadi bernilai religius. Politik menjadi salah satu bentuk peribadatan pada Tuhan.

Dakwah di kalangan PKS dipahami sebagai "aktivitas mengajak manusia kepada Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, sehingga mereka meninggalkan *thaghut* dan beriman kepada Allah agar mereka keluar dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam (Irsyadurrahim et. all. (ed), tt)." Sebagai sebuah aktivitas keagamaan, dakwah dinilai sebagai kewajiban setiap muslim dalam mewujudkan akidah dan pemikirannya. Aktivitas mengajak kepada agama Islam itu diyakini tidak akan berjalan maksimal jika tanpa ada pengorganisasian. Dengan kata lain, pengorganisasian menjadi syarat utama bagi aktivitas dakwah. Medium pengorganisasian itulah yang kemudian diwujudkan menjadi partai politik. Dengan pemahaman seperti ini, partai politik berikut segala aktivitasnya

dalam keyakinan kader PKS adalah sama religiusnya dengan aktivitas dakwah itu sendiri.

Aktivitas keagamaan biasanya bukan hanya soal kewajiban atau bukan, tapi juga berkaitan dengan konsep pahala dan dosa atau akibat dari dilakukan atau tidak nya aktivitas itu. Hal yang sama juga berlaku dengan pemahaman dakwah di kalangan kader PKS. Dakwah diyakini sebagai amal (tindakan) yang paling utama dan kehidupan yang berisi aktivitas dakwah adalah kehidupan yang dikehendaki dan direstui Tuhan. Karena kehidupan dalam dakwah itu direstui Tuhan maka diyakini akan membawa berkah. Disamping itu tentu saja dijanjikan pahala yang berlipat ganda bagi pelakunya. Dari sini kita melihat, aktivitas berpolitik lewat partai bagi kader PKS adalah bentuk kehidupan yang dikehendaki dan direstui Tuhan yang karenanya mendatangkan kehidupan yang berkah dan pahala yang melimpah.

Konsep tentang dakwah semacam ini yang dapat menjelaskan dengan baik aktivitas politik PKS. Artikel ini akan memberi contoh *marketing* politik untuk membuktikan kaitan konsep dakwah dengan tindakan politik PKS. Konsep inti dari *marketing* politik PKS adalah dakwah itu sendiri. Sebagai gerakan dakwah, PKS tidak sekedar menjalankan memasarkan partainya lewat publikasi atau iklan-iklan di media, tapi justru memilih pendekatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan aktivitas politik yaitu melalui pengajian-pengajian dan kegiatan-kegiatan sosial. Pengajian adalah aktivitas penyebaran agama Islam yang biasanya dilakukan lewat metode ceramah.

Pada satu sisi, para kader PKS di tingkat lokal menggunakan momentum pengajian dan kegiatan sosial sebagai sarana untuk menyiarkan Islam dan pada saat yang sama memanfaatkan aktivitas keagamaan itu untuk merekrut kader-kader baru. Paling tidak ada tiga keuntungan yang ditanggung PKS dari aktivitas pengajian dan kegiatan sosial yaitu terlaksananya kewajiban agama, penyebaran ajaran Islam "versi" PKS, pencitraan sebagai partai yang dekat dan peduli dengan rakyat dan keuntungan strategis-politis berupa terbukanya kemungkinan merekrut kader-kader baru. Bahkan, seandainya pun tidak sampai terjadi rekrutmen politik, PKS tetap mendapatkan keuntungan yang sangat berharga, yaitu jaringan sosial yang suatu hari nanti dapat dimanfaatkan demi tujuan politis mereka.

Sebagaimana karakter dakwah dalam Islam yang tidak mengenal batas waktu, *marketing* politik yang dilakukan oleh kader PKS pun demikian. Identitasnya sebagai partai dakwah membuat PKS memasarkan partainya terus-menerus dan tidak berbatas waktu atau tidak pernah berhenti. Maksudnya, aktivitas kader PKS seperti melakukan pengajian atau merekrut kader baru tidak bergantung dengan momen politik tertentu, seperti pemilu. Sedang menghadapi pemilu atau tidak, *marketing* politik kader PKS tetap berlangsung. *Marketing* politik semacam ini adalah kebijakan partai secara institusi yang dilakukan secara sukarela oleh kader-kadernya.

Semangat dan energi yang besar dan tidak kenal lelah para kader PKS itu tidak dapat dijelaskan selain dengan penjelasan dakwah. Tindakan seseorang akan selalu berkaitan dengan manfaat atau balasan yang bisa didapatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Orientasi manfaat yang hendak diraih bagi tiap orang berbeda-beda, ada yang lebih mengutamakan manfaat yang sifatnya materi namun tidak sedikit juga yang menganggap manfaat immaterial sebagai sesuatu yang berharga. Salah satu contoh manfaat immaterial yang disediakan oleh agama adalah pahala. Karena sifatnya yang sakral itulah maka aktivitas dakwah menjadi sesuatu yang berharga bagi setiap muslim, termasuk kader PKS. Sangat sulit dibayangkan aktivitas politik yang sifatnya sukarela sepanjang tahun dan dari tahun ke tahun dapat dilakukan jika tidak didasari motivasi yang bersifat agung dan sakral.

Oleh PKS, dakwah tidak sekedar dilakukan lewat pengajian-pengajian. Kebijakan strategis PKS di Purbalingga memanasifasikan dakwah dalam wujud kegiatan-kegiatan sosial. Ada tiga kegiatan sosial PKS di Purbalingga yang menjadi andalan dalam memasarkan PKS ke warga, yaitu pembentukan Tim Tanggap Bencana Alam, kegiatan bakti sosial dan pemberian jasa khitanan gratis dan layanan pinjaman mobil gratis. Meskipun ketiga kegiatan sosial itu berongkos mahal, namun diakui cukup mampu mencitrakan PKS sebagai partai yang peduli dan dekat dengan masyarakat. Khusus tentang Tim Tanggap Bencana, pembentukan tim ini sangat relevan dengan kondisi Purbalingga yang memang termasuk daerah rawan bencana.

***Halaqah* dan sosialisasi politik**

Marketing politik PKS tidak mungkin berjalan baik tanpa ditopang oleh sistem kaderisasi yang kuat. Sukar dibayangkan, PKS dapat menjalankan sekian banyak kegiatan sosial dan mampu bertahan di tengah gugurnya partai-partai tanpa memiliki kader-kader yang loyal dan siap digerakkan kapan saja. Sistem kaderisasi *halaqah* ala PKS ini menjadi ujung tombak dalam rekrutmen kader-kader baru. PKS di setiap daerah, termasuk di Purbalingga, memerintahkan kader-kader intinya sebagai penanggung jawab di tiap daerah pemilihan (dapil). Kader-kader inti ini wajib membangun dan mengembangkan jaringan pengajian di dapil-dapil. Metode yang dipakai PKS adalah *direct selling* yang nilai utamanya adalah silaturahmi. Lewat *direct selling*, PKS membuka wilayah-wilayah baru dan kader-kader baru secara pro-aktif baik melalui jalur teman, keluarga atau individu-individu tertentu.

Yang harus segera ditekankan di sini, nilai *halaqah* bagi PKS bukan hanya sekedar demi kepentingan pemasaran politik, namun dia juga menjadi sangat bernilai dalam perspektif budaya politik. Salah satu karakter *halaqah* dalam kaderisasi PKS adalah sifatnya yang organisasional. Dalam sistem pengkaderan PKS, *halaqah* adalah jantungnya karena lewat dia lah mekanisme kaderisasi itu berjalan. Bisa dikatakan, tanpa *halaqah*, kaderisasi di PKS tidak akan pernah berwujud dan punya implikasi luas sebagaimana sekarang. Untuk memahami bagaimana dia menjadi inti dari kaderisasi politik PKS dan menjadi sarana bagi pembentukan identitas, nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan kader PKS, akan diuraikan lebih jauh tentang makna *halaqah* ala PKS tersebut.

Sebagai gerakan Islam, PKS terpengaruh oleh sebuah gerakan Islam dari Mesir, yaitu Ikhwanul Muslimin (IM) (Machmudi, 2008, Fealy dan Bubalo, 2007). IM adalah gerakan Islam yang dibentuk pada 1928 oleh seorang guru bernama Hasan Al Banna. Selain dari gagasan-gagasan reformasi Islam yang disuarakan oleh Jamaludin Al Afghani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, dalam membentuk organisasi IM, Al Banna mengambil inspirasi dari gerakan tasawuf. Sebelum membentuk organisasi sendiri, dia memang pernah bergabung dengan sebuah jamaah tasawuf bernama Tarekat Hasafiyah. Selain aspek spiritualisme,

dari tasawuf Al Banna mengambil gagasan pengorganisasian persaudaraan ala tasawuf.⁴

Gerakan Tarbiyah, yang kemudian menjelma menjadi PKS itu, menggunakan kata "*tarbiyah*" karena inti dari kegiatan keislamannya adalah pendidikan yang dalam Bahasa Arab berarti *tarbiyah*. *Tarbiyah* menunjuk pada kegiatan pengawasan spiritual oleh seorang pembimbing spiritual (*mursyid*) dari sebuah kelompok sufi. *Tarbiyah* bertujuan untuk mengolah dan menaikan kualitas spiritual murid di bawah bimbingan guru mereka. Oleh Al Banna, *tarbiyah* dikembangkan menjadi tidak sekedar tempat pembimbingan spiritual saja, namun juga sarana untuk meningkatkan pengetahuan keislaman. Wujud dari *tarbiyah* sendiri adalah sebuah kelompok religius kecil yang disebut dengan *usrah* yang secara literal berarti keluarga (Machmudi, 2007: 134).

Aktivitas *tarbiyah* semacam ini yang diadopsi oleh Al Banna dari gerakan tasawuf, kemudian menginspirasi aktivis gerakan Tarbiyah untuk menggunakannya di komunitas mereka. Meskipun istilah *usrah* dikenal di kalangan kader gerakan Tarbiyah, namun sebutan *halaqah* untuk menyebut kelompok religius kecil tadi lebih sering dipakai. *Halaqah* sendiri secara literal berarti lingkaran atau lebih khusus lagi menunjuk pada pertemuan religius kecil di mana seorang guru dikelilingi oleh 5-10 orang murid (Machmudi, 2007: 134-135). Pada awalnya, aktivitas rekrutmen kader oleh gerakan Tarbiyah masih acak dan pengorganisasian *halaqah*-nya pun masih belum rapih. Setelah menjelma menjadi partai politik, rekrutmen dan keanggotaan yang dikelola lewat *halaqah* dilakukan secara rapi (Edward, 2006: 17).

Dalam rekrutmen dan pengorganisasian anggotanya lewat *halaqah*, gerakan Tarbiyah menggunakan sistem sel. Sebuah *halaqah* dipimpin dan dikelola oleh seorang yang disebut *murabbi*. Anggota *halaqah*, mereka yang menerima binaan dari *murabbi* disebut *mutarabbi*. Setiap *murabbi* mendidik anggotanya (*mutarabbi*) melalui *halaqah* dan bertanggung jawab mengantarkan *mutarabbi*-nya untuk memenuhi target dan kriteria tertentu sesuai jenjang keanggotaannya sebagaimana yang ditetapkan oleh partai. Secara umum target *tarbiyah* lewat *halaqah* adalah terbentuknya kader dengan sejumlah karakter tertentu (Edward, 2006: 13-14).

⁴ Lebih jauh tentang sejarah IM lihat misalnya Al Husaini, I.M. (1983). *Ikhwanul Muslimun* (Jakarta: Penerbit Grafiti Press)

Mutarabbi yang dianggap telah memenuhi kriteria tertentu (yang itu berarti kenaikan jenjang keanggotaan) pada gilirannya akan diminta memikul tanggung jawab menjadi *murabbi*. Dia akan melakukan proses yang sama sebagaimana yang pernah dilakukan oleh *murabbi*-nya: merekrut dan membina kader-kader baru dan mengantarkannya sampai mencapai kriteria tertentu. Pada saat yang sama, dia juga masih berstatus sebagai *mutarabbi*. *Mutarabbi*-nya itu juga, setelah dianggap mampu, akan memikul tanggung jawab yang sama menjadi *murabbi*. Begitu seterusnya proses kaderisasi PKS lewat *halaqah* dilakukan. Dalam sistem kaderisasi PKS, seorang kader idealnya adalah *mutarabbi* sekaligus *murabbi*.

Dalam *halaqah* itulah sosialisasi nilai-nilai dan keyakinan dilakukan. Tema-tema materi yang telah disinggung di atas seperti mengenal agama Islam (*ma'rifah din Al Islam*), perubahan yang islami (*al inqilab al islami*) pembentukan masyarakat islami (*takwin al ummah*), definisi dakwah (*ma'na ad da'wah*) dan keutamaan dakwah (*fadhaa'il da'wah*) termasuk yang disampaikan dalam *halaqah*. Selain nilai-nilai dan keyakinan untuk membentuk kepribadian yang cenderung kognitif dan spiritual, *halaqah* juga menyosialisasikan nilai-nilai lain yang cenderung afektif. Salah satu fungsi vital *halaqah* adalah memperkuat ikatan persaudaraan di antara anggotanya.

Meski diakui cukup efektif dalam mencapai tujuan-tujuannya, sistem *halaqah* yang diadopsi PKS dari Al Banna ini bukanya tanpa kritik. Dalam persaudaraan sufi, posisi sang guru (*mursyid*) adalah sangat sentral. Dia adalah sumber otoritas pengetahuan sekaligus spiritual. Seorang murid harus mengikuti instruksi bimbingan sang guru tanpa syarat. Model pengelolaan *halaqah* semacam inilah yang diterapkan oleh Al Banna di IM yang di kemudian hari diadopsi oleh PKS. Dalam *halaqah* yang dilakukan oleh PKS hubungan antara *murabbi* dengan *mutarabbi* tampak tidak simetris sebagaimana yang dipraktikkan oleh gerakan tasawuf dan IM. Karena *mutarabbi* harus mengikuti apa yang diinstruksikan oleh *murabbi* maka proses penyampaian pengetahuan menjadi seperti indoktrinasi (Machmudi, 2007).

Dengan menerapkan model pembinaan seperti gerakan tasawuf itu IM mendapatkan kritik yang cukup tajam. Secara umum kritik tersebut bermuara pada model kepemimpinan Al Banna yang mengadopsi gaya persaudaraan sufi yang dianggap tidak demokratis atau autokratis. Model kepemimpinan seperti itu

dinilai lahir dari model pembinaan kader lewat *usrah* atau *halaqah* tadi. Karena PKS mengadopsi model *halaqah* yang dibuat Al Banna, maka PKS juga berpotensi mengidap gejala yang sama (Machmudi, 2007). Artikel ini tidak berpretensi untuk mengatakan bahwa PKS secara internal tidak demokratis. Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa selain mendapatkan pengetahuan yang bersifat kognitif dan spiritual, kader PKS juga menginternalisasi "kurikulum tersembunyi" berupa hubungan *murabbi-mutarabbi* yang cenderung tidak demokratis.

Dalam perspektif konsep budaya politik, sosialisasi politik yang merupakan proses yang lewatnya kita belajar tentang politik bukan sekedar soal pengetahuan yang internalisasi oleh individu, melainkan juga soal emosi dan identitas. Dasar-dasar tentang loyalitas politik dan praktik-praktik politik bisa juga didapatkan lewat pengamatan dan pengalaman terhadap bagaimana konsep hubungan kekuasaan dijalankan. Praktik sosial yang dilakukan terus menerus dan diwariskan dalam *halaqah*, akan mengendap dan menjadi nilai-nilai dasar yang berpengaruh terhadap pilihan-pilihan tindakan politik kader PKS. Budaya instruksi yang ada dalam hubungan *murabbi-mutarabbi* itu memuluskan jalan partai ketika hendak menyukseskan target politik tertentu.

Contohnya adalah dalam kasus memilih calon anggota legislatif (caleg) dalam pemilu 2009 di Purbalingga. Meskipun partai secara formal mendukung semua caleg, namun struktur partai dari tingkat kecamatan hingga ranting menginstruksikan kader PKS untuk memprioritaskan caleg tertentu yang berada di urutan 1 (satu) dan 2 (dua). Instruksi partai tersebut terbukti efektif. Tiga caleg yang lolos ke DPRD bernomor urut 1 (satu), sisanya bernomor urut 2 (dua). Dari sudut pandang kepentingan partai, model instruksi memang sangat efektif, namun dari sudut pandang pembangunan budaya politik demokratis, hal itu cukup problematis.

Partai politik sebagai sarana kaderisasi dan pendidikan politik seharusnya turut berperan dalam mengembangkan budaya politik demokratis. Jika sebuah partai justru menanamkan bibit perilaku politik yang kurang demokratis, tentu itu kurang menguntungkan proses demokratisasi secara lebih luas. PKS memang sah-sah saja memiliki mekanisme organisasi yang khas milik mereka, namun itu bukan berarti tidak boleh ada catatan kritis terhadapnya. Dalam menghadapi soal caleg mana yang seharusnya dipilih oleh kader partai, kami berpendirian,

seharusnya partai membebaskan kadernya untuk memilih siapapun caleg yang diajukan oleh partai. Partai tidak boleh mewajibkan atau memberi instruksi untuk memilih caleg tertentu karena itu berarti sudah bertindak tidak demokratis terhadap calon lainnya.

Kesimpulan

Budaya politik PKS memuat nilai-nilai, keyakinan dan sentimen yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Inti dari nilai dan keyakinan yang membentuk pandangan dan sikap politik kader PKS adalah keyakinan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Ajarannya meliputi seluruh bidang kehidupan manusia, termasuk politik. Setiap kader PKS diajarkan untuk harus mewujudkan kesempurnaan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Realisasinya dalam bidang politik adalah turut berpartisipasi aktif lewat partai politik (yang dalam hal ini adalah PKS). Selain dilihat sebagai bentuk perwujudan kesempurnaan Islam, partisipasi politik adalah salah satu manifestasi dari doktrin dakwah sebagai kewajiban setiap muslim. Oleh karena itulah, PKS mengklaim sebagai partai dakwah. Keyakinan berpolitik sebagai bagian dari dakwah memberi suntikan semangat yang tiada habisnya bagi kader PKS.

Sosialisasi politik yang dialami kader PKS terutama didapatkan lewat *halaqah*. Setiap kader PKS diwajibkan untuk mengikuti proses pengkaderan lewat *halaqah*. Materi-materi pengkaderan PKS yang membentuk nilai-nilai dan keyakinan dasar terutama disampaikan lewat *halaqah*. Selain penyampaian pengetahuan, sosialisasi politik lewat *halaqah* juga memberikan nilai-nilai lain kepada kader PKS. Pola hubungan antara *murabbi-mutarabbi* yang ada dalam *halaqah* cenderung tidak simetris dan lebih berupa indoktrinasi. Hubungan kekuasaan yang cenderung tidak demokratis itu dapat berpotensi negatif terhadap pembangunan budaya politik demokratis di internal PKS.[]

Daftar Pustaka

Al Husaini, I.M. (1983). *Ikhwanul Muslimun* (Jakarta: Penerbit Grafiti Press).

Almond, G. dan Verba, S. (1963). *The Civic Culture* (Princeton: Princeton University Press).

Edward, D. (2006). *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera* (Bandung: Syaamil).

Fealy, G. dan Bubalo, A. (2007). *Jejak Kafilah. Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia* (Jakarta: Mizan).

Irsyadurrahim et all (ed). (tanpa tahun). *Materi Tarbiyah. Panduan Kurikulum Da'i dan Murabbi*. Versi e-book.

Hague, R., Harrop, M. dan Breslin, S. (1998). *Comparative Government and Politics. An Introduction. 4th edition* (Hampshire dan London: Macmillan Press).

Kamrava, M. (1996). *Understanding Comparative Politics. A Framework for Analysis* (London: Routledge)

Machmudi, Y. (2008). *Islamising Indonesia. The Rise of Jemaah Tarbiyah and The Prosperous Justice Party (PKS)*, thesis Doctor of Philosophy di South-East Asia Center, Australian National University, Canberra.

Newton, K. dan Van Deth, J.W. (2005) *Foundations of Comparative Politics* (Cambridge: Cambridge University Press).

Olick, J. dan Omeltchenko, T. Political Culture dalam *International Encyclopedia of Social Sciences*, 2nd edition. Diakses dari: http://www.virginia.edu/sociology/publications/faculty%20articles/OlickArticles/ies_s.pc.pdf. 2010.

Zussman, D. Political Culture dalam *The Canadian Encyclopedia*. Diakses dari: <http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ART0006369>. 2010.

Wawancara

Ustad Hamim Tohari, Ketua Dewan Syariah Daerah PKS Purbalingga

Aris Widiarso, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PKS Purbalingga

Karsono, S.Pd.I., Anggota DPRD Kabupaten Purbalingga dari Fraksi PKS
Mukharir Akhmad, S.Sos, Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Purbalingga